

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar belakang**

Dalam rangka peningkatan transparansi kondisi keuangan Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dan penyusunan laporan keuangan BPR yang relevan, komprehensif, andal dan dapat diperbandingkan, maka Ratna E. Aminaty selaku Direktur Direktorat Kredit, BPR, dan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Bank Indonesia (BI) mewajibkan BPR untuk menyusun dan juga menyajikan laporan keuangan berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang relevan bagi BPR. Dengan diberlakukannya Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) bagi entitas yang memiliki akuntabilitas publik yang signifikan, sepanjang otoritas berwenang mengatur penggunaan SAK ETAP dimaksud, Bank Indonesia menerbitkan Surat Edaran No. 11/37/DKBU pada tanggal 31 Desember 2009 sebagai dasar hukum penggunaan SAK ETAP bagi BPR. Saat ini sedang dilakukan finansial penyusunan Pedoman Akuntansi bagi BPR (PA-BPR) yang disusun bersama oleh Bank Indonesia, Ikatan Akuntan Indonesia (IAI), dan industri BPR. Bank Indonesia juga mengeluarkan Surat Edaran No. 12/14/DKBU pada tanggal 1 Juni 2010 sebagai pedoman pelaksanaan SAK ETAP bagi BPR perihal Pelaksanaan Pedoman Akuntansi BPR.

Ahmad Waluyo, Eny Suprapti, dan Satria Budi (2011) telah melakukan sebuah penelitian yang mengemukakan bahwa dalam perlakuan akuntansi

penyajian laporan keuangan harus terdapat unsur-unsur *identification, measurement, recognition, valuation dan presentation* agar sebuah laporan keuangan memberikan informasi yang relevan bagi pengguna laporan keuangan sesuai kondisi pada masing-masing BPR. Apabila BPR telah menggunakan unsur-unsur tersebut di dalam laporan keuangannya serta berpedoman pada SAK ETAP yang berlaku dan juga pada Pedoman Akuntansi BPR (PA-BPR), BPR akan merasakan dampak baik dari penyajian laporan keuangan tersebut. Sedangkan Perhimpunan Bank Perkreditan Rakyat Indonesia (PERBARINDO), Dewan Standar Akuntansi Keuangan - Ikatan Akuntan Indonesia (DSAK-IAI), dan Bank Indonesia memandang bahwa SAK ETAP dapat menjadi acuan bagi BPR. Hal tersebut dikarenakan SAK ETAP sesuai dengan kebutuhan BPR dan tidak terlalu banyak mengalami perubahan. Pemberlakuan SAK ETAP mulai awal tahun lalu dirasakan telah memberi manfaat bagi industri BPR. Dengan SAK ETAP ini, pelaporan keuangan BPR menjadi transparan, komprehensif dan relevan (Bali Post, 14 Maret 2011). Untuk itu, jika pada tahun buku 2011 BPR belum menerapkan SAK ETAP dalam pelaporan keuangannya, maka laporan keuangan BPR yang bersangkutan terancam dinilai sebagai laporan keuangan yang tidak wajar dalam laporan akuntan independen.

Menurut Aan Ardiyanto selaku Direktur PT. BPR Bintang Mitra yang berada di Surabaya mengatakan bahwa BPR yang saat ini dipimpinnya masih menggunakan standar akuntansi keuangan yang lama, akan tetapi sesuai dengan Surat Edaran yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia BPR yang dipimpinnya juga telah menggunakan SAK ETAP sebagai pedoman dalam menyusun dan

melaporkan laporan keuangan dan PA-BPR yang memuat penjelasan dan contoh-contoh perhitungan yang diharapkan dapat mempermudah pemahaman terhadap SAK ETAP bagi BPR. Menurut Aan, penggunaan SAK ETAP dirasa belum maksimal. Hal tersebut dikarenakan apabila menggunakan SAK ETAP secara penuh dalam menyusun dan melaporkan laporan keuangan akan membutuhkan biaya yang cukup tinggi.

Melihat adanya fenomena permasalahan yang dialami BPR di atas, dan berdasarkan pada latar belakang dan juga penelitian terdahulu maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Pemahaman Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) pada Pegawai Bank Perkreditan Rakyat”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

“Bagaimana tingkat pemahaman pegawai Bank Perkreditan Rakyat terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP) ? “

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat pemahaman pegawai Bank Perkreditan Rakyat terhadap Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP).

#### **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Akademis
  - a. Memberikan sumbangsih pemikiran tentang pemahaman SAK ETAP bagi BPR.
  - b. Dapat menjadi acuan serta pedoman dalam melakukan penelitian yang sejenis.
  - c. Dapat memberikan tambahan wacana ilmu pengetahuan khususnya dalam pemahaman SAK ETAP bagi BPR.
2. Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR)
  - a. Menambah pemahaman serta pengetahuan terhadap SAK ETAP.
  - b. Memberikan kemudahan dalam menyajikan informasi akuntansi sesuai dengan SAK ETAP yang berlaku sesuai dengan surat edar yang diajukan oleh Bank Indonesia.
3. Bagi Penulis

Penelitian ini dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai SAK ETAP khususnya pada BPR serta lebih mendalami ilmu statistik.

## **1.5 Sistematika Penulisan**

### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat serta sistematika penulisan penelitian.

### **BAB II LANDASAN TEORI**

Dalam bab ini diuraikan teori-teori dan konsep-konsep yang berhubungan dengan penelitian yang akan dijadikan sebagai acuan dalam kerangka penelitian untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian ini.

### **BAB III METODE PENELITIAN**

Bab ini berisi tentang pedoman dalam menyelesaikan masalah mulai dari rancangan penelitian, batasan penelitian, jenis dan sumber data, serta metode pengumpulan data dan juga teknik analisis data.

### **BAB IV GAMBARAN SUBYEK PENELITIAN DAN ANALISIS DATA**

Dalam bab ini akan membahas mengenai gambaran dari subyek penelitian dan membahas mengenai hasil dari analisis data yang dilakukan dalam penelitian.

### **BAB V PENUTUP**

Pada bab ini akan menguraikan tentang kesimpulan penelitian serta keterbatasan dari penelitian dan saran yang dapat digunakan bagi pihak-pihak yang terkait.